

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori *Knowledge Based View* (KBV)

Produksi yang efisien dengan sumber daya yang beragam dan tidak seragam bukanlah hasil dari keunggulan sumber daya itu sendiri, melainkan dari pengetahuan tentang cara memanfaatkannya secara optimal. Pemikiran ini melahirkan pendekatan *Knowledge-Based View* (Alchian & Demsetz, 1972). Teori *Knowledge Based View* (KBV) menyatakan bahwa kesuksesan suatu bisnis bergantung pada tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya (Curado & Bontis, 2006). Dengan menggunakan pengetahuan yang optimal dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan memiliki potensi untuk mencapai tujuan bisnisnya, seperti meningkatkan pendapatan (Cheng et al., 2010). Karena perannya yang vital dalam menentukan keberhasilan bisnis, pengetahuan menjadi aspek krusial bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberhasilan sebuah bisnis juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku bisnis itu sendiri (Curado & Bontis, 2006).

Penelitian ini mengacu pada teori *Knowledge-Based View* (KBV), yang menegaskan bahwa pengetahuan merupakan elemen kunci dalam pengelolaan usaha. Keberhasilan UMKM sangat bergantung pada penguasaan pengetahuan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar SAK EMKM. Kinerja UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek, namun pengetahuan tetap menjadi faktor utama yang mendukung kesuksesan usaha.

### 2.1.2 Teori *Stakeholder*

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap operasionalnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu bersikap tegas dalam pengambilan keputusan serta menyampaikan informasi secara transparan dan relevan agar bermanfaat bagi *stakeholder* (Freeman, 1994). Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelangsungan bisnisnya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan dampak dan manfaat bagi para pemangku kepentingan. *Stakeholder* menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku bisnis dalam mengungkapkan atau menyajikan informasi dalam laporan keuangan. Tujuan dari teori ini adalah untuk mendorong pelaku bisnis agar memberikan nilai tambah dari kegiatan perusahaan serta membantu mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan bagi para pemangku kepentingan. Kehadiran *stakeholder* memegang peran yang penting dalam aktivitas perusahaan (Naomi, 2021).

Implikasi dari teori *Stakeholder* dalam penelitian ini berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan SAK EMKM di UMKM, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti pemilik usaha, karyawan, pemerintah, kreditor, dan pelanggan. Teori ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis.

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK EMKM berperan dalam memberikan transparansi serta informasi yang dapat dipercaya, sehingga membantu *stakeholders* memahami kondisi keuangan UMKM. Dengan cara ini, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik, seperti kreditor yang menilai kelayakan pinjaman dan pemerintah yang memverifikasi kepatuhan terhadap perpajakan.

### 2.1.3 SAK EMKM

#### a. Pengertian SAK EMKM

Mengingat pentingnya laporan keuangan bagi suatu entitas, pada tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merilis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Tujuannya adalah membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menyusun laporan keuangannya sehingga hasilnya lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. SAK EMKM terdiri dari 18 bab yang mencakup berbagai aturan terkait, mulai dari ruang lingkup, konsep dan prinsip dasar yang berlaku umum, penyajian laporan keuangan, hingga ketentuan transisi dan tanggal efektif. Komponen penyajian laporan keuangan ini termasuk penyajian yang wajar, kepatuhan terhadap SAK EMKM, frekuensi pelaporan, konsistensi penyajian, informasi komparatif, serta identifikasi laporan keuangan (Handayani, 2018).

#### b. Karakteristik SAK EMKM

SAK EMKM memiliki karakteristik sebagai berikut (Handayani, 2018) :

- 1) Standar akuntansi yang berdiri sendiri (tidak mengacu pada SAK Umum).
- 2) Mayoritas penggunaannya menggunakan konsep biaya historis.
- 3) Hanya mengatur transaksi umum yang dilakukan Usaha Kecil dan Menengah.
- 4) Pengaturannya lebih sederhana dibandingkan SAK Umum dan SAK ETAP.

Menurut Handayani (2018), dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa karakteristik dari segi kualitatif, yaitu :

a) Dapat dipahami

Kualitas utama dari informasi dalam laporan keuangan adalah kemampuannya untuk mudah dipahami oleh pengguna, yang diasumsikan memiliki pengetahuan dasar tentang ekonomi, bisnis, dan akuntansi serta keinginan untuk memahami informasi dengan saksama. Meskipun keterbacaan laporan sangat penting, hal ini tidak boleh mengorbankan relevansi informasi. Jika informasi terlalu kompleks, sebagian pengguna mungkin mengalami kesulitan memahaminya, sehingga penyederhanaan perlu dipertimbangkan.

b) Relevan

Untuk memiliki manfaat, informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dianggap relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna, baik dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, saat ini, atau masa depan, maupun dengan mengonfirmasi atau mengoreksi evaluasi sebelumnya.

c) Materialitas

Informasi dianggap signifikan jika kelalaian atau kesalahan dalam pencatatannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna berdasarkan laporan keuangan. Tingkat signifikansi ini bergantung pada ukuran pos atau kesalahan dalam konteks tertentu, baik berupa kesalahan pencatatan maupun kelalaian mencantumkan. Namun, tidak tepat untuk secara sengaja membuat kesalahan kecil dalam pencatatan demi memenuhi persyaratan penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK EMKM.

d) Keandalan

Untuk menjadi bermanfaat, informasi yang dipresentasikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya. Informasi dianggap memiliki kualitas keandalan jika tidak mengandung kesalahan yang signifikan dan tidak terpengaruh oleh bias, serta disajikan secara jujur sesuai dengan apa yang seharusnya dipresentasikan atau yang diharapkan dapat dipresentasikan secara wajar.

e) Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya direkam dan dijelaskan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang terkandung di dalamnya, bukan hanya mengikuti bentuk hukumnya. Tindakan ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keandalan laporan keuangan.

f) Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang terdapat dalam laporan keuangan harus diperhatikan dengan serius. Ini mencakup berbagai peristiwa yang dijelaskan dengan sifat dan penjelasan yang memadai, serta melalui penggunaan pertimbangan yang bijaksana dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan yang bijaksana melibatkan kehati-hatian untuk memastikan bahwa aset atau pendapatan tidak diperbesar dan kewajiban atau beban tidak direduksi. Namun, penggunaan pertimbangan yang bijaksana tidak boleh digunakan untuk menyésatkan dengan membentuk aset atau pendapatan yang lebih rendah atau mencatat kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pertimbangan yang bijaksana harus bebas dari bias.

g) Kelengkapan

Untuk memastikan keandalan, informasi dalam laporan keuangan harus menyertakan semua hal yang relevan dalam batas materi yang sesuai dengan biaya yang wajar. Ketidakinginan untuk mengungkapkan informasi secara sengaja dapat mengakibatkan ketidakakuratan atau penyajian yang menyesatkan, sehingga tidak dapat diandalkan dan kurang memadai dalam hal relevansi.

h) Dapat Dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus mampu membandingkan konsistensi posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dari satu periode ke periode lainnya, serta melakukan perbandingan antar-entitas untuk menilai posisi, kinerja, dan perubahan keuangan relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa serupa perlu dilakukan secara konsisten dalam suatu entitas, antar periode, dan antar entitas. Selain itu, pengguna harus mendapatkan informasi tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk perubahan kebijakan tersebut dan dampaknya.

i) Tepat Waktu

Agar informasi dalam laporan keuangan relevan, informasi tersebut harus dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Ketepatan waktu berarti informasi disajikan cukup cepat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Penundaan dalam pelaporan dapat mengurangi relevansi informasi. Manajemen perlu menyeimbangkan antara ketepatan waktu dan keandalan informasi. Dalam mencapai keseimbangan ini, fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi secara optimal.

j) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi haruslah melebihi biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. Namun, penilaian biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang penting. Biaya tersebut juga tidak harus ditanggung oleh pengguna yang menerima manfaatnya. Dalam mengevaluasi manfaat dan biaya, entitas harus menyadari bahwa manfaat informasi mungkin juga dinikmati oleh pengguna eksternal.

c. Penggunaan SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk entitas yang tidak memiliki kewajiban publikasi. Entitas tanpa kewajiban publikasi merujuk kepada entitas yang :

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum financial bagi pengguna eksternal.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau sedang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
- 2) Entitas menguasai aset sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang, pedagang efek, dana pensiun, dan bank investasi.

d. Konsep SAK EMKM

Menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) tahun 2016, konsep entitas bisnis atau unit usaha menjadi penting untuk memastikan bahwa transaksi perusahaan tidak bercampur dengan keuangan pribadi direktur utama, karyawan, atau pemiliknya. SAK EMKM secara tegas menjelaskan bahwa konsep entitas bisnis adalah salah satu asumsi dasar yang harus dipatuhi untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar tersebut. Artinya, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa apabila suatu entitas tidak memenuhi asumsi dasar mengenai konsep entitas bisnis, maka meskipun entitas tersebut telah memenuhi syarat kualitatif dan kuantitatif dalam SAK EMKM, penerapan standar tersebut tidaklah wajib dan dapat dikecualikan.

e. Manfaat dan Tujuan SAK EMKM

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2009 mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditujukan untuk entitas kecil dan menengah. Namun, menyadari kebutuhan akan standar akuntansi yang lebih sederhana bagi entitas mikro kecil dan menengah, DSAK IAI kemudian menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016. Tujuan dari SAK EMKM adalah agar semua unit usaha dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Setiap perusahaan memiliki prinsip keberlanjutan usaha (*going concern*), yang berarti perusahaan diharapkan terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk meyakinkan publik bahwa perusahaan tersebut dapat dipercaya. Dalam akuntansi, hal ini diwujudkan melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Penyajian laporan keuangan sesuai standar membantu manajemen dalam menentukan kebijakan masa depan, memperoleh pinjaman, dan lainnya (Tatik, 2018).

SAK EMKM disusun dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dari entitas mikro, kecil, dan menengah. Standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum dapat memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur oleh SAK ETAP. Harapannya, SAK EMKM dapat memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan mereka dengan tepat, tanpa harus terjebak dalam kompleksitas standar akuntansi keuangan yang ada saat ini.

SAK EMKM disusun dengan pendekatan yang cukup sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan bagi pengguna yang mayoritas merupakan perusahaan skala kecil dan menengah. Entitas yang dimaksud adalah unit usaha yang beraktivitas, namun sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat secara luas, atau dengan kata lain, merupakan kepemilikan perorangan atau sekelompok orang, di mana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis usaha semacam ini mendominasi sekitar 80% dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat diperlukan dalam hal penyusunan laporan keuangan (Purwanti, 2018).

#### **2.1.4 Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM**

Laporan Keuangan yang mengikuti SAK EMKM terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016). Dari ketiga bagian ini, informasi terkait kondisi keuangan perusahaan dapat diperoleh. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai laporan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM :

a. Laporan posisi keuangan akhir periode

Laporan posisi keuangan atau neraca menampilkan kondisi keuangan suatu entitas pada waktu tertentu, termasuk rincian aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Berdasarkan SAK EMKM yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada 2016, laporan ini memberikan gambaran mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Aset terdiri dari aset lancar, yang diharapkan terealisasi dalam waktu kurang dari 12 bulan (seperti kas, piutang, dan persediaan), dan aset tidak lancar, yang berupa aset jangka panjang dan tak berwujud. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pihak lain, seperti utang dan pinjaman. Ekuitas, atau modal, merupakan selisih antara total aset dan liabilitas, mencakup saham biasa dan preferen. Laporan ini membantu pihak terkait memahami kondisi keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan strategis.

Berikut adalah format laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK EMKM :

**Tabel 2.1**  
**Format laporan posisi keuangan akhir periode**

ENTITAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20XX			
ASET	Catatan	20xx	20xx
Kas dan Setara Kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<b><i>Jumlah kas dan setara kas</i></b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar dimuka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Ak. penyusutan		(xxx)	(xxx)
<b>Jumlah aset</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Liabilitas</b>			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba	9	xxx	xxx
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : SAK EMKM, 2016

b. Laporan Laba-Rugi

Laporan laba rugi menampilkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu dalam menjalankan operasinya. Berdasarkan SAK EMKM dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), laporan laba rugi dapat mencakup berbagai akun seperti pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Informasi dalam laporan ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selama jangka waktu tertentu, baik bulanan maupun tahunan, serta mencakup transaksi yang menghasilkan laba atau rugi. Berikut ini adalah format laporan laba rugi sesuai dengan SAK EMKM :

**Tabel 2.2**  
**Format laporan laba-rugi**

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
31 DESEMBER 20XX			
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Beban</b>			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
<b>Jumlah Beban</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
<b>Laba (Rugi) setelah pajak penghasilan</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : SAK EMKM, 2016

c. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan seringkali tidak menyajikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan catatan atas laporan keuangan untuk menambahkan informasi yang relevan dalam bentuk deskriptif dan disampaikan melalui narasi. Selain itu, catatan tersebut dapat membantu dalam menginterpretasikan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan keseluruhan laporan keuangan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis sesuai kebutuhan praktis, dimana setiap akun dalam laporan keuangan mencantumkan informasi terkait yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup tambahan sebagai berikut :

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- 3) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi yang penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

**Tabel 2.3**  
**Format catatan atas laporan keuangan**

<p>ENTITAS</p> <p>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</p> <p>31 DESEMBER 20XX DAN 20XX</p>
<p>1. UMUM</p> <p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20xx yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p> <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Persyaratan Kepatuhan</p> <p>Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas UMKM.</p> <p>b. Dasar Penyusunan</p> <p>Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang Usaha</p> <p>Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p>

ENTITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

3. KAS

	2xxx	2xxx
Kas kecil X - Rupiah	xxx	xxx

4. GIRO

	2xxx	2xxx
PT Bank XX - Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	<u>2xxx</u>	<u>2xxx</u>
PT Bank xxx - Rupiah	xxx	x xx
Suku Bunga Deposito		
	<u>2xxx</u>	<u>2xxx</u>
Rupiah	4,50%	5,00%

ENTITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

6. PIUTANG USAHA

	2xxx	2xxx
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	2xxx	2xxx
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan Perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

8. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan kontribusi kepada pemilik.

ENTITAS		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 20XX DAN 20XX		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	2xxx	2xxx
Penjualan	xxx	xxx
Retur Penjualan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN-LAIN		
	2xxx	2xxx
Bunga Pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	2xxx	2xxx
Pajak Penghasilan	xxx	xxx

Sumber : SAK EMKM, 2016

### 2.1.5 UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan entitas usaha yang saat ini terus mendapatkan prioritas atau perhatian dari pemerintah, karena kontribusinya bagi perekonomian negara. Kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, yaitu :

a. Usaha mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Aset  $\leq$  Rp50.000.000,00. Memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Omset  $\leq$  Rp300.000.000,00. Memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha kecil

Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh usaha menengah atau besar, dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Rp50.000.000,00 < Aset  $\leq$  Rp500.000.000,00. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- 2) Rp300.000.000,00 < Omset  $\leq$  2.500.000.000,00. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh usaha kecil atau besar, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Rp500.000.000,00 < Aset  $\leq$  Rp10.000.000.000,00. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2)  $\text{Rp}2.500.000.000,00 < \text{Omset} \leq \text{Rp}50.000.000.000,00$ . Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari  $\text{Rp}2.500.000.000,00$  (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak  $\text{Rp}50.000.000.000,00$  (lima puluh milyar rupiah).

### **2.1.6 Peran Akuntansi Bagi UMKM**

Akuntansi memiliki peran penting dalam kesuksesan usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Informasi akuntansi dapat menjadi landasan yang handal untuk pengambilan keputusan dalam mengelola UMKM (Mulyani *et al.*, 2019). Laporan keuangan UMKM yang dihasilkan dari informasi akuntansi dapat digunakan oleh manajer atau pemilik UMKM untuk mengambil keputusan ekonomi terkait dengan perusahaan mereka. Penyediaan informasi akuntansi untuk UMKM juga penting untuk mendapatkan akses subsidi pemerintah dan tambahan modal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengetahui modal adalah faktor kunci dalam mengelola sebuah usaha, dan akses tambahan modal dari subsidi pemerintah dapat mendorong perkembangan UMKM.

Penerapan akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tanpa laporan keuangan, para pelaku usaha tidak dapat mengetahui secara tepat pendapatan, pengeluaran, dan laba usaha mereka. Laporan keuangan UMKM membantu dalam menetapkan harga produksi dan juga memberikan gambaran tentang kondisi usaha serta digunakan untuk mengontrol keuangan. Di dalam laporan keuangan terdapat informasi tentang arus keuangan, yang dapat membantu dalam persiapan keuangan usaha untuk masa depan.

Laporan keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah catatan sederhana yang disusun oleh pemilik usaha untuk menilai profitabilitas bisnis mereka. Dalam penyusunan laporan keuangan, penting bagi UMKM untuk konsisten dalam mencatat setiap transaksi dalam jurnal atau laporan keuangan, serta menyimpan bukti transaksi secara dokumentatif agar proses pencatatan keuangan menjadi lebih mudah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Penelitian oleh (Utari <i>et al.</i> , 2022) “Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Studi Kasus UMKM Di Kota Tanjungbalai.”	Hasil penelitian ini adalah masih kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM akan adanya SAK EMKM.	Objek penelitian ini berada di Kota Tanjungbalai
2.	Penelitian oleh (Amalia dan Oktari, 2023) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAK EMKM Pada Laporan Keuangan UMKM di Kota Jambi.”	Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi mengenai SAK EMKM di kalangan masyarakat Jambi.	Objek penelitian ini berada di UMKM Kota Jambi

3.	<p>Penelitian Oleh (Aritonang <i>et al.</i>, 2023) “Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kec. Galang (Studi Kasus UMKM Mulia Maju Panglong).”</p>	<p>Penyajian laporan tahunan Mulia Maju Panglong tidak dapat dikatakan lengkap dari sudut pandang SAK EMKM. Hasil laporan tersebut, Mulia Maju Panglong tidak sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku saat menyerahkan perhitungan tahunannya.</p>	<p>Objek penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kecamatan Galang</p>
4.	<p>Penelitian oleh (Uno <i>et al.</i>, 2019) “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo).”</p>	<p>Rumah Karawo belum melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang berlaku.</p>	<p>Objek penelitian ini adalah usaha yang bergerak di bidang pakaian di Kota Gorontalo</p>

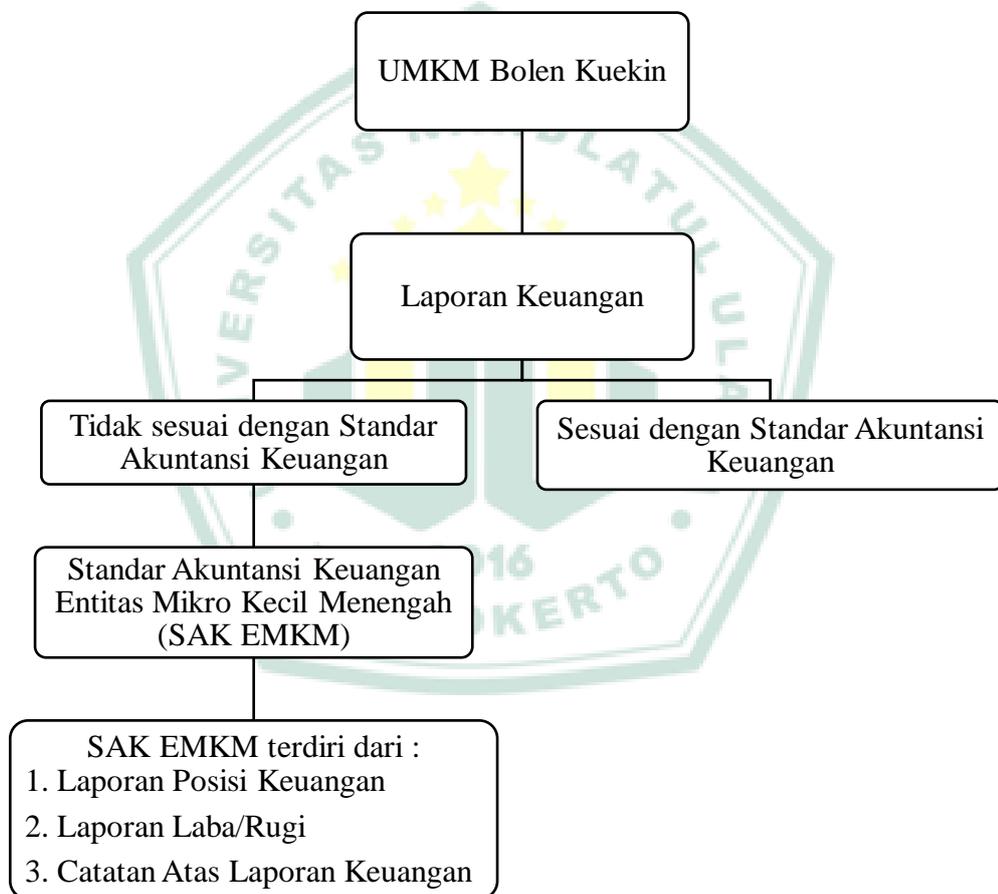
5.	Penelitian oleh (Mortigor Afrizal Purba, 2019) “Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam.”	Pembukuan akuntansi pada UMKM di Kelurahan Tanjung Riau secara garis besar belum menunjukkan adanya penerapan SAK-EMKM.	Objek penelitian ini berada di Kelurahan Tanjung Riau Kota Batam
6.	Penelitian oleh (Rizky Aminatul Mutiah, 2019) “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM.”	Hasil dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan SAK EMKM karena pencatatan pembelian masih sederhana.	Objek penelitian ini berada di Perusahaan Silky Parijatak di Kabupaten Banyuwangi
7.	Penelitian oleh (Tambariki <i>et al.</i> , 2023) “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dan Asas Keberlanjutan Usaha Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada UMKM di Kelurahan Paal 4 Kota Manado).”	Penyusunan laporan keuangan oleh UMKM di Kelurahan Paal IV belum memenuhi standar sepenuhnya. Beberapa laporan tidak mencantumkan CALK, dan terdapat istilah serta pengukuran yang tidak sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman dalam menyusun laporan keuangan.	Objek penelitian ini berada di Kelurahan Paal 4 Kota Manado

8.	<p>Penelitian oleh (Wiwik Fitria Ningsih, 2022) “Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Rakhis Grosir Kabupaten Banyuwangi.”</p>	<p>UMKM Rakhis Grosir tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, terutama karena faktor internal dari dalam usaha tersebut. Pemilik merasa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menyusun laporan keuangan dengan benar.</p>	<p>Objek penelitian ini berada di bidang pembuatan tas anyaman di Kabupaten Banyuwangi</p>
9.	<p>Penelitian oleh (Saputra <i>et al.</i>, 2024) “Analisis dan Perancangan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Classyid.Thrift.”</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah laporan keuangan pada UMKM Classyid.thrift sudah mengacu pada SAK EMKM.</p>	<p>Objek penelitian ini adalah UMKM yang bergerak dalam bidang pakaian di Kabupaten Cirebon.</p>
10.	<p>Penelitian oleh (Mahadharna dan Trihastuti, 2024) “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Mr Froniez.”</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu Mr Froniez belum melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Mr Froniez hanya menyusun laporan laba rugi dari UMKM.</p>	<p>Objek pada penelitian ini berada di Kecamatan Wiyung, Surabaya</p>

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah rangkaian konsep dan hubungan yang jelas antara konsep-konsep tersebut, yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian, dengan mempertimbangkan teori yang telah dikembangkan dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kerangka pikir dapat diuraikan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam penelitian ini, peneliti merancang sebuah kerangka berpikir guna mengevaluasi sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh UMKM Bolen Kuekin. Fokus utama dari penelitian ini adalah menilai apakah UMKM tersebut telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau belum. Hal ini penting karena laporan keuangan yang sesuai standar dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajemen maupun pihak eksternal.

UMKM Bolen Kuekin merupakan entitas usaha mikro yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan oleh UMKM bisa dilakukan secara bervariasi, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Apabila belum sesuai, maka UMKM perlu mengacu pada SAK EMKM, yang dirancang khusus untuk memudahkan entitas mikro dalam menyusun laporan keuangan secara sederhana namun tetap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. SAK EMKM terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Melalui analisis terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM Bolen Kuekin, peneliti berharap dapat menarik kesimpulan serta memberikan saran yang relevan dan aplikatif berdasarkan hasil penelitian.